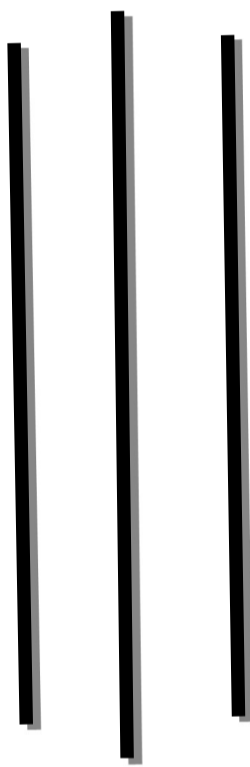




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



TAHUN 2021-2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGASEM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widi Wasa) karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem

Amlapura, 25 Mei 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem



I Ketut Kanginan Subandi, SH

Pembina Tk.I

NIP.19621231 198603 1 326

DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR.....		1
DAFTAR ISI.....		2
BAB I PENDAHULUAN.....		3
1.1 Latar Belakang.....		3
1.2 Landasan Hukum.....		5
1.3 Maksud dan Tujuan.....		10
1.4 Sistematika Penulisan.....		11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL.....		13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol		13
2.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol.....		28
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol.....		31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol		39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL		41
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol.....		42
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.....		45
3.3 Telaahan Renstra Kajian K/L dan Renstra		46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....		47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....		48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol.		50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		53
5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol.....		53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		55
6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....		55
6.2 Pagu Indikatif Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....		60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		73
BAB VIII PENUTUP.....		83

BAB. I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2021 – 2026. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan pembangunan baik fisik maupun mental sumber daya manusia berpedoman pada hal tersebut di atas, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 yang memuat indikator kinerja pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, mempertimbangkan pengintegrasian konsep SDGs ke dalam RPJMD. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (Good Governance), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Perda No. 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem merupakan bagian dari Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan dengan mempertimbangkan ketentuan pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 yang memuat indikator kinerja pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, mempertimbangkan pengintegrasian konsep SDGs ke dalam RPJMD, berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan sistematika, penyesuaian data dan evaluasi, penyesuaian indikator kinerja pemerintah daerah, target dan realisasi kinerja serta proyeksi kemampuan keuangan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku Dalam konteks pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Karangasem menyusun Renstra Tahun 2021 – 2026, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan. Renstra yang disusun memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Karangasem, sebagaimana amanat pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Pelaksanaan lebih lanjut Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 berpedoman pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 11. NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (11,65/2020), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode tahun 2021-2026
- d. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2021– 2026 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD serta sistematika penulisan renstra PD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

Memuat informasi tentang peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan sarana prasarana, kondisi umum yang mejadi kewenangan PD, dan jenis pelayanan dan kelompok sasaran yang diampu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Mengemukakan indentifikasi permasalahan yang dihadapi Badan

Kesatuan

Bangsa dan Politik, telaah Visi, Misi dan Program RPJMD, telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja yang disajikan dalam Tabel T.C. 25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang disajikan dalam Tabel T.C. 26

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif) disajikan dalam Tabel T.C. 27

BAB VII KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGASEM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam Tabel T.C. 28

BABVIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karangasem adalah membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Karangasem. Untuk melaksnakan tugas pokok dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku,

umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2021, Susunan Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Karangasem.

Dalam menjalankan tugas, Kepala Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan

- nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Sekretaris Badan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Sekretariat Kesbangpol sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Sekretariat Kesbangpol sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi umum meliputi:
 - 1. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 2. kepegawaian;
 - 3. keuangan;
 - 4. kearsipan;
 - 5. perlengkapan; dan
 - 6. urusan rumah tangga Kesbangpol;
- d. menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi Kesbangpol;

- e. menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan protokoler Kesbangpol;
- f. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan;

Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis Kesbangpol;
- b. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan kehumasan; dan
- d. Penyelenggaraan pusat data dan informasi Kesbangpol.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
 - i. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - iii. melaksanakan kegiatan administrasi persuratan, tatalaksana, tata usaha pimpinan, kearsipan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, aset dan rumah tangga Kesbangpol;
 - iv. menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Kesbangpol;
 - v. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokoler pada Kesbangpol;
 - vi. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 - vii. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

- viii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Badan Kesbangpol mempunyai tugas:
- i. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - ii. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Kesbangpol;
 - iii. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja Kesbangpol;
 - iv. penyelenggaraan pusat data dan informasi Kesbangpol;
 - v. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 - vi. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - vii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi penata usahaan pengelolaan administrasi keuangan Kesbangpol mempunyai tugas:
- i. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - ii. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan Kesbangpol;
 - iii. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 - iv. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Bidang- Bidang

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- i. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- ii. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- iii. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- iv. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; dan
- vi. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan 2 Subbidang yaitu:

1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- iii. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- iv. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa menyelenggarakan fungsi:

- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- iii. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- iv. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- i. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- ii. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- iii. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- iv. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten; dan
- vi. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu:

1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi menyelenggarakan fungsi:

- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- iii. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- iv. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik menyelenggarakan fungsi:

- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- iii. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- iv. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- i. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- ii. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- iii. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- iv. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
- vi. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu:

1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
2. Subbidang Organisasi Masyarakat.

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan menyelenggarakan fungsi:

- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- iii. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- iv. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- v. memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- vi. memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- vii. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing menyelenggarakan fungsi:

- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- iii. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- iv. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- v. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- i. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- ii. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,

- fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- iii. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - iv. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - vi. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan 2 (dua) Subbidang yaitu:

1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
2. Subbidang Penanganan Konflik.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan menyelenggarakan fungsi:

- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

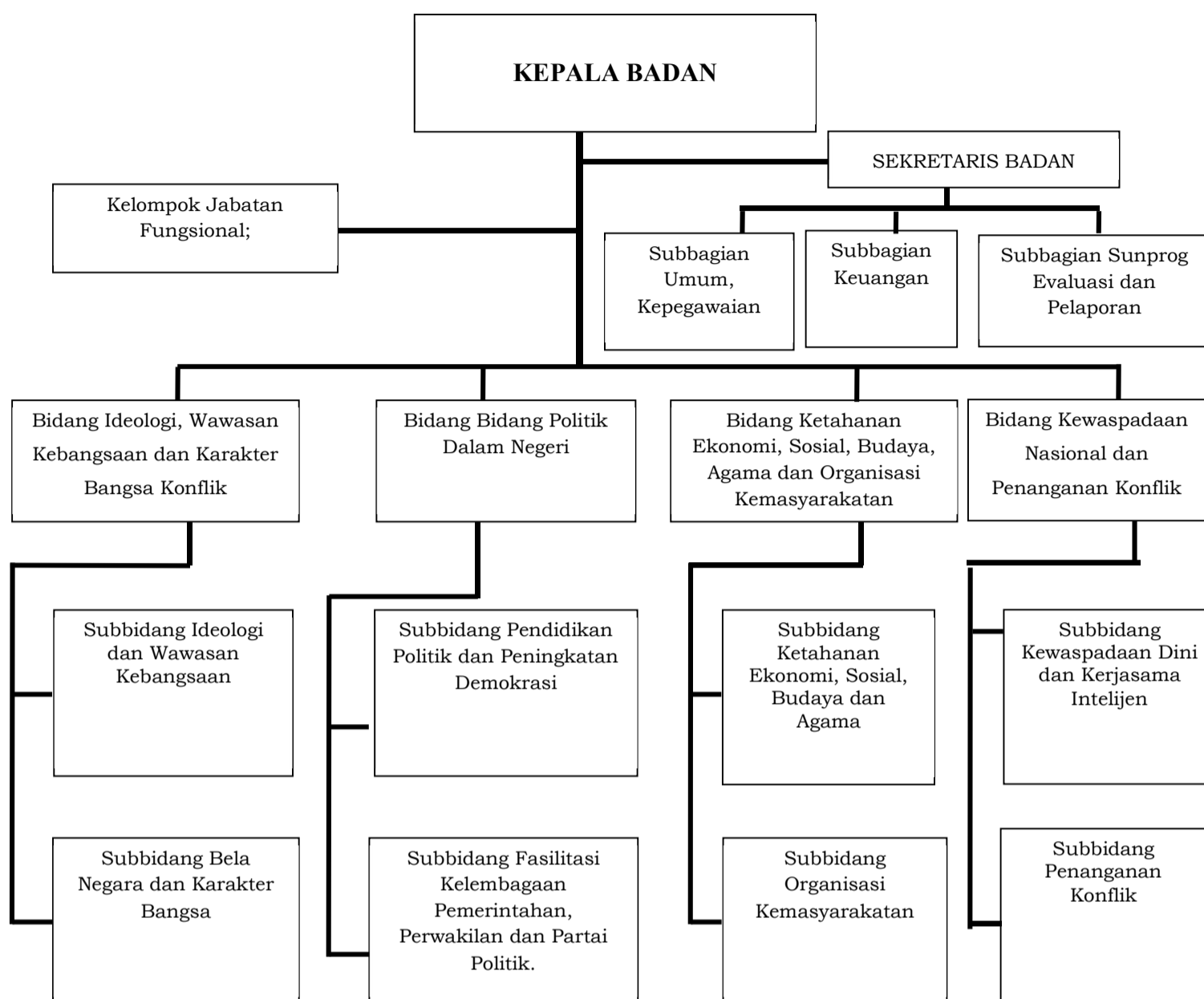
- iii. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- iv. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik menyelenggarakan fungsi:

- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada Subbidang Penanganan Konflik;
- ii. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Penanganan Konflik;
- iii. menyiapkan pelaksanaan kebijakan bidang Penanganan Konflik;
- iv. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per bulan Mei 2021 jumlah Pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah 29 orang PNS dan 24 Non PNS yang terdiri dari:

1. Kepala Badan 1 Orang
2. Sekretaris Badan 1 Orang
3. Sub Bagian 3 Orang
4. Kepala Bidang 3 Orang
5. Sub Bidang 4 Orang
6. Staf PNS 17 Orang
7. Staf Non PNS 24 orang

Uraian berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah Pegawai berdasarkan latar belakang Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Menurut Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Pegawai		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	-/-	-/-	-
2	SMP	4	-/-	4
3	SMA/SMK	7	12	19
4	Sarjana S-1/ D-IV	15	12	27
5	Sarjana S-2	3	-/-	3
6	Doktor S-3	-/-	-/-	-
TOTAL :		29	24	53

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2021

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I	IV/b	2 orang
2	Pembina	IV/a	2 Orang
3	Penata Tk. I	III/d	5 Orang
4	Penata	III/c	2 Orang
5	Penata Muda Tk. I	III/b	3 Orang
6	Penata Muda	III/a	5 Orang
7	Pengatur	II/c	3 Orang
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2 Orang
9	Juru Tk I	I/d	4 Orang
Jumlah			29 rang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Aset	Jumlah Aset / kondisi	
		Baik	Kurang baik/ Rusak
1	2	3	4
1	Station Wagon	3	1
2	Sepeda Motor	11	3
3	Speed Boat		1
4	Air Conditioning	12	1
5	Rak Besi/Metal	3	2
6	Filling Besi/Metal	12	
7	Brand Kas	1	
8	Almari kayu	2	
9	Mesin Absensi	1	1
10	Rak Kayu	13	2

No	Nama Aset	Jumlah Aset / kondisi	
		Baik	Kurang baik/ Rusak
1	2	3	4
11	Meja Kayu/Rotan	1	5
12	Meja Rapat	16	
13	Meja Reseption	2	
14	Meja Tambahan	1	
15	Kursi	106	41
16	Meja Komputer		1
17	Meja Biro	22	
18	Sofa	4	1
19	Meja Tamu	2	
20	Wireless	2	
21	Handy Cam	4	2
22	Personal Komputer	22	3
23	Lap Top	10	3
24	Note Book		2
25	Hard Disk	1	
26	Printer	20	5
27	Computer Compatible	3	
28	Hardisk External	1	1
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	5
31	Proyektor + Attachment	2	2
32	Telephone Hybird	1	
33	Handy Talky	27	9
34	Facsimile	2	
35	Layar	2	

Sumber : daftar inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa politik di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi :

1. Struktur masyarakat adat di Kabupaten Karangasem yang memiliki karakteristik kebersamaan dan gotong royong yang mendukung pengembangan budaya politik.
2. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
4. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat bernegara kebangsaan.
5. Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Semakin baiknya kerjasama dan kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat pemuka desa adat dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban.
7. Terselenggaranya koordinasi antara Kominda dan Dewan Pembina Kominda.

Adapun kegiatan-kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegaaahan Tindak Kriminal
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8. Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan
9. Program peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)
10. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel TC. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada tahun ke			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100%	1.350.000	2.000.000	2.000.000	500.000	2.300.000	1.350.000	1.998.000	1.998.000	498.000	100	100	100	100
02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%	42.000.000	42.000.000	50.000.000	30.000.000	42.000.000	29.564.689	29.388.138	26.832.766	24.636.813	70	70	54	82
03	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional			100%	15.809.821	20.000.000	20.000.000	5.000.000	20.000.000	5.262.600	7.784.900	4.309.100	4.614.700	33	39	22	92
04	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			100%	36.000.000	33.500.000	34.000.000	38.500.000	35.000.000	35.007.000	29.970.000	30.000.000	34.675.250	97	89	88	90
05	Penyediaan Alat Tulis kantor			100%	50.000.000	45.000.000	45.000.000	43.707.000	40.000.000	48.434.500	38.346.500	38.834.400	37.922.500	97	85	86	87
06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100%	34.140.300	34.984.000	30.000.000	25.388.500	25.000.000	33.557.800	34.900.000	29.968.300	22.170.800	98	100	100	87
07	penyediaan komponen instalansi, listrik/penerangan bangunan kantor			100%	7.283.000	7.791.000	7.000.000	1.947.400	17.000.000	7.260.500	7.689.200	5.414.400	1.410.600	100	99	77	72
08	Penyediaan peralatan rumah tangga			100%	30.000.000	20.957.000	20.000.000	12.909.700	28.000.000	29.997.400	20.248.000	19.231.300	12.426.000	100	97	96	96
09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			100%	14.352.000	14.600.000	15.000.000	15.000.000	11.000.000	14.352.000	12.584.000	14.352.000	14.352.000	100	86	96	96
10	Penyediaan makanan dan minuman			100%	39.882.000	34.668.000	40.000.000	25.094.200	60.000.000	39.882.000	34.026.000	33.255.000	12.700.000	100	98	83	51
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			100%	129.000.000	180.000.000	159.615.000	25.000.000	138.075.000	127.052.240	106.545.590	158.309.341	24.928.000	98	59	99	100
12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan			100%	271.800.000	321.600.000	378.072.000	441.888.000	485.300.000	252.000.000	280.000.000	368.472.000	439.488.000	93	87	97	99
13	Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan			100%	25.000.000	26.000.000	45.000.000	28.200.000	50.000.000	23.400.000	20.350.000	43.644.000	19.400.000	94	78	97	69
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			100%	40.000.000	40.000.000	50.000.000	-	-	17.130.000	36.850.000	44.090.000	-	43	92	88	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%													
1	Pengadaan kendaraan dinas bermotor / operasional			100%				-	86.550.000								
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			100%	10.000.000		90.530.600	-	46.950.000	8.600.000		87.301.280		86		96	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			100%	-	22.106.700	52.142.200	-	20.000.000		22.106.700	51.620.000			100	99	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			100%	-		-	-	20.000.000			-					
5	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional			100%	192.000.000	172.500.000	205.000.000	164.597.500	208.200.000	191.633.531	154.969.618	204.814.750	162.992.050	100	90	100	99
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			100%	-				20.000.000			-					
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			100%	-		20.000.000	-	27.000.000			-					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada tahun ke			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan																
01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			100%	37.393.100	42.000.000	40.000.000	30.967.900	57.000.000	37.124.600	31.654.850	33.861.340	29.169.700	99	75	85	94
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																
1	Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			100%	1.189.306.560	1.181.611.800	1.152.465.700	426.770.600	320.000.000	1.111.359.900	757.227.950	957.092.590	357.512.000	93	64	83	84
2	Operasional Forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kabupaten Karangasem			100%	227.720.000	627.280.000	148.000.000	15.357.700	227.720.000	208.810.250	535.328.776	106.700.900	14.778.100	92	85	72	96
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																
1	Terciptanya Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegah kejahatan			100%	76.200.800	50.000.000	60.586.600	-	86.000.000	66.333.300	40.618.651	45.857.800		87	81	76	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																
1	Perayaan Hari-hari besar nasional dan daerah			100%	30.000.000	22.592.500	30.000.000	8.000.000	736.800.000	3.961.100	12.963.725	22.525.300	2.100.000	13	57	75	26
2	Upacara Apel Bendera peringatan Sumpah Pemuda			100%	118.118.000	70.000.000				94.992.898	60.663.580			80	87		
3	Forum komunikasi dan konsultasi lembaga sosial			100%	28.098.500	28.130.000	33.580.000	22.603.650	30.000.000	20.787.600	22.868.541	30.316.450	18.911.650	74	81	90	84
4	Operasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)			100%	92.280.000	102.700.000	260.000.000	112.005.800		86.003.350	84.179.950	192.894.650	60.424.000	93	82	74	54
5	Pelatihan Kader Bela Negara			100%				-	100.000.000								
6	Operasional Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)			100%	110.000.000	63.701.950	60.600.000	2.461.900	150.000.000	82.661.750	84.179.950	49.284.187	1.250.000	75	132	81	51
7	Tersusunnya Rencana Aksi			100%					655.787.800								
8	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan			100%					112.280.000								
9	Terselenggaranya pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai			100%					491.937.000								
10	Terselenggaranya apel peringatan hari lahir pancasila			100%					345.787.800								
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan																
1	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan			100%	10.000.000	38.458.125	60.498.500	-	35.000.000	8.901.800	31.380.625	10.938.100		89	82	18	
	Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan																
1	Operasional Kominda Kabupaten Karangasem			100%	906.368.200	819.400.000		-	900.000.000	858.892.825	725.243.634			95	89		
2	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem (FORKOPIMDA)			100%	150.000.000	156.285.000	209.328.000	22.878.700	274.000.000	94.272.200	73.256.200	73.254.100	21.395.500	63	47	35	94

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :					Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada tahun ke			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Operasional Forum Muspida			100%	-												
	Program peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)																
1	Pengawasan Peredaran Gelap narkoba			100%					75.000.000								
2	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba			100%	103.473.950					99.022.121				96			
3	Operasional BNK			100%	763.632.500	300.000.000				741.468.572	114.386.875			97	38		
4	Pelatihan kader Penyuluh Narkoba			100%	191.583.500	190.000.000				178.911.300	179.041.625			93	94		
5	Penyuluh pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Mikol			100%			105.580.000	-	103.226.250			99.286.800				94	
6	Penyuluh Pencegahan Praktek Prostitusi			100%			85.205.000	-	283.830.600			78.130.550				92	
7	Pelatih Kader Penyuluh Pekat			100%			104.620.000	67.371.050	312.943.150			98.978.511	55.306.500			95	82
	Program Pendidikan Politik Masyarakat																
1	Monitoring , evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol			100%	38.004.100	36.091.200	40.000.000	9.000.000	63.000.000	25.080.080	31.637.835	34.539.500	8.252.500	66	88	86	92
2	Monitoring , evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan			100%	38.754.000	21.197.500		10.000.000	60.000.000	15.635.000		-	8.985.500	40	-		90
3	Tim Koordinasi dukungan Kelancaran pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur			100%	119.790.200	92.911.250				102.043.173	83.010.430			85	89		
4	Fasilitas organisasi Kemasyarakatan			100%	187.448.719	45.000.000	41.223.605	-			20.146.600	-			45	-	
5	Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat			100%	96.352.900	86.462.100	46.000.000	-	160.000.000	90.899.771	41.466.200	42.854.200		94	48	93	
6	Forkomkon Parpol			100%	33.478.800	36.729.375	32.000.000	-	100.000.000	29.872.350	33.928.919	29.178.400		89	92	91	
7	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Aliansi Organisasi Kemasyarakatan			100%	100.203.400	68.676.750	106.000.000	25.000.000	60.000.000	64.516.766	23.678.100	94.333.900	23.061.100	64	34	89	92
8	Sosialisasi Wawasan Politik masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa			100%			48.000.400	-	200.000.000			44.015.100				92	
9	Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Presiden dan pemilu legislatif			100%			160.000.000	-				98.191.093				61	
10	Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati			100%				143.716.000				130.338.100					91
11	Terbentuknya tim terpadu dalam melaksanakan pengawasan ormas di daerah.			100%					90.000.000								
TOTAL				100%	5.586.824.350	5.096.934.250	4.087.047.605	1.753.865.600	7.412.687.600	4.886.034.966	3.824.619.662	3.304.680.108	1.543.699.363	87	75	81	88

Tabel TC.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem

Uraian	Anggaran Tahun :					Realisasi Anggaran Tahun:				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun :				Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000	2.000.000	2.000.000	500.000	2.000.000	1.350.000	1.998.000	1.998.000	498.000	100	100	100	100	1.570.000	1.461.000
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	42.000.000	50.000.000	30.000.000	39.000.000	29.564.689	29.388.138	26.832.766	24.636.813	70	70	54	82	40.600.000	27.605.602
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	15.809.821	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000	5.262.600	7.784.900	4.309.100	4.614.700	33	39	22	92	15.161.964	5.492.825
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36.000.000	33.500.000	34.000.000	38.500.000	32.000.000	35.007.000	29.970.000	30.000.000	34.675.250	97	89	88	90	34.800.000	32.413.063
Penyediaan Alat Tulis kantor	50.000.000	45.000.000	45.000.000	43.707.000	43.406.000	48.434.500	38.346.500	38.834.400	37.922.500	97	85	86	87	45.422.600	40.884.475
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.140.300	34.984.000	30.000.000	25.388.500	24.542.700	33.557.800	34.900.000	29.968.300	22.170.800	98	100	100	87	29.811.100	30.149.225
penyediaan komponen instalansi, listrik/penerangan bangunan kantor	7.283.000	7.791.000	7.000.000	1.947.400	2.047.500	7.260.500	7.689.200	5.414.400	1.410.600	100	99	77	72	5.213.780	5.443.675
Penyediaan peralatan rumah tangga	30.000.000	20.957.000	20.000.000	12.909.700	13.322.900	29.997.400	20.248.000	19.231.300	12.426.000	100	97	96	96	19.437.920	20.475.675
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.352.000	14.600.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.352.000	12.584.000	14.352.000	14.352.000	100	86	96	96	14.790.400	13.910.000
Penyediaan makanan dan minuman	39.882.000	34.668.000	40.000.000	25.094.200	55.484.000	39.882.000	34.026.000	33.255.000	12.700.000	100	98	83	51	39.025.640	29.965.750
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	129.000.000	180.000.000	159.615.000	25.000.000	138.075.000	127.052.240	106.545.590	158.309.341	24.928.000	98	59	99	100	126.338.000	104.208.793
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	271.800.000	321.600.000	378.072.000	441.888.000	485.300.000	252.000.000	280.000.000	368.472.000	439.488.000	93	87	97	99	379.732.000	334.990.000
Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan	25.000.000	26.000.000	45.000.000	28.200.000	18.850.000	23.400.000	20.350.000	43.644.000	19.400.000	94	78	97	69	28.610.000	26.698.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.000.000	40.000.000	50.000.000	-	68.000.000	17.130.000	36.850.000	44.090.000	-	43	92	88	-	39.600.000	24.517.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														-	-
Pengadaan kendaraan dinas bermotor / operasional				-	-									-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000		90.530.600	-	26.360.000	8.600.000		87.301.280		86		96		25.378.120	23.975.320
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	22.106.700	52.142.200	-	-		22.106.700	51.620.000			100	99		14.849.780	18.431.675
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		-	-	5.000.000			-						1.000.000	-
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	192.000.000	172.500.000	205.000.000	164.597.500	220.331.200	191.633.531	154.969.618	204.814.750	162.992.050	100	90	100	99	190.885.740	178.602.487
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-							-						-	-

Uraian	Anggaran Tahun :					Realisasi Anggaran Tahun:				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun :				Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-		20.000.000	-	9.000.000			-				-		5.800.000	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan														-	-
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	37.393.100	42.000.000	40.000.000	30.967.900	36.013.900	37.124.600	31.654.850	33.861.340	29.169.700	99	75	85	94	37.274.980	32.952.623
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan														-	-
Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1.189.306.560	1.181.611.800	1.152.465.700	426.770.600	372.401.550	1.111.359.900	757.227.950	957.092.590	357.512.000	93	64	83	84	864.511.242	795.798.110
Operasional Forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kabupaten Karangasem	227.720.000	627.280.000	148.000.000	15.357.700	85.406.950	208.810.250	535.328.776	106.700.900	14.778.100	92	85	72	96	220.752.930	216.404.507
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal														-	-
Terciptanya Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegah kejahatan	76.200.800	50.000.000	60.586.600	-	269.900.000	66.333.300	40.618.651	45.857.800	-	87	81	76		91.337.480	38.202.438
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan														-	-
Perayaan Hari-hari besar nasional dan daerah	30.000.000	22.592.500	30.000.000	8.000.000	392.852.250	3.961.100	12.963.725	22.525.300	2.100.000	13	57	75	26	96.688.950	10.387.531
Upacara Apel Bendera peringatan Sumpah Pemuda	118.118.000	70.000.000				94.992.898	60.663.580			80	87			37.623.600	38.914.120
Forum komunikasi dan konsultasi lembaga sosial	28.098.500	28.130.000	33.580.000	22.603.650	229.794.300	20.787.600	22.868.541	30.316.450	18.911.650	74	81	90	84	68.441.290	23.221.060
Operasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	92.280.000	102.700.000	260.000.000	112.005.800		86.003.350	84.179.950	192.894.650	60.424.000	93	82	74	54	113.397.160	105.875.488
Pelatihan Kader Bela Negara				-	97.061.850									19.412.370	-
Operasional Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)	110.000.000	63.701.950	60.600.000	2.461.900	169.854.800	82.661.750	84.179.950	49.284.187	1.250.000	75	132	81	51	81.323.730	54.343.972
Tersusunnya Rencana Aksi														-	-
Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan					112.280.000									22.456.000	-
Terselenggaranya pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai					491.937.000									98.387.400	-
Terselenggaranya apel peringatan hari lahir pancasila					345.787.800									69.157.560	-
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan														-	-
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	10.000.000	38.458.125	60.498.500	-	35.000.000	8.901.800	31.380.625	10.938.100		89	82	18		28.791.325	12.805.131
Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan														-	-
Operasional Kominda Kabupaten Karangasem	906.368.200	819.400.000		-	900.000.000	858.892.825	725.243.634			95	89			525.153.640	396.034.115

Uraian	Anggaran Tahun :					Realisasi Anggaran Tahun:				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun :				Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem (FORKOPIMDA)	150.000.000	156.285.000	209.328.000	22.878.700	274.000.000	94.272.200	73.256.200	73.254.100	21.395.500	63	47	35	94	162.498.340	65.544.500
Operasional Forum Muspida	-													-	-
Program peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)														-	-
Pengawasan Peredaran Gelap narkoba					75.000.000									15.000.000	-
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	103.473.950					99.022.121				96				20.694.790	24.755.530
Operasional BNK	763.632.500	300.000.000				741.468.572	114.386.875			97	38			212.726.500	213.963.862
Pelatihan kader Penyuluh Narkoba	191.583.500	190.000.000				178.911.300	179.041.625			93	94			76.316.700	89.488.231
Penyuluh pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Mikol			105.580.000	-	103.226.250			99.286.800	-			94		41.761.250	24.821.700
Penyuluh Pencegahan Praktek Prostitusi			85.205.000	-	283.830.600			78.130.550	-			92		73.807.120	19.532.638
Pelatih Kader Penyuluh Pekat			104.620.000	67.371.050	312.943.150			98.978.511	55.306.500			95	82	96.986.840	38.571.253
Program Pendidikan Politik Masyarakat														-	-
Monitoring , evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol	38.004.100	36.091.200	40.000.000	9.000.000	63.000.000	25.080.080	31.637.835	34.539.500	8.252.500	66	88	86	92	37.219.060	24.877.479
Monitoring , evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan	38.754.000	21.197.500		10.000.000	60.000.000	15.635.000		-	8.985.500	40	-		90	25.990.300	6.155.125
Tim Koordinasi dukungan Kelancaran pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur	119.790.200	92.911.250				102.043.173	83.010.430			85	89			42.540.290	46.263.401
Fasilitas organisasi Kemasyarakatan	187.448.719	45.000.000	41.223.605	-			20.146.600	-			45			54.734.465	5.036.650
Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	96.352.900	86.462.100	46.000.000	-	160.000.000	90.899.771	41.466.200	42.854.200		94	48	93		77.763.000	43.805.043
Forkomkon Parpol	33.478.800	36.729.375	32.000.000	-	100.000.000	29.872.350	33.928.919	29.178.400		89	92	91		40.441.635	23.244.917
Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Aliansi Organisasi Kemasyarakatan	100.203.400	68.676.750	106.000.000	25.000.000	60.000.000	64.516.766	23.678.100	94.333.900	23.061.100	64	34	89	92	71.976.030	51.397.467
Sosialisasi Wawasan Politik masyarakat dan Pemerintah / negara bagi kepala desa			48.000.400	-	200.000.000			44.015.100				92		49.600.080	11.003.775
Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Presiden dan pemilu legislatif			160.000.000	-				98.191.093				61		32.000.000	24.547.773
Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati				143.716.000					130.338.100				91	28.743.200	32.584.525
Terbentuknya tim terpadu dalam melaksanakan pengawasan ormas di daerah.					90.000.000									18.000.000	-
Jumlah	5.586.824.350	5.096.934.250	4.087.047.605	1.753.865.600	6.533.009.700	4.886.034.966	3.824.619.662	3.304.680.108	1.543.699.363	87	75	81	-	4.611.536.301	3.003.833.684

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk mendukung berlangsungnya upaya – upaya pembangunan di semua bidang dan prioritas – prioritas pembangunan yang mana salah satunya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka akan dituntut suatu situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif dan terkendali baik dari segi keamanan , ketertiban, ketentraman karena kondisi yang kondusif dan terkendali yang merupakan prasyarat utama yang di dukung oleh masyarakat yang mandiri, sadar, demokrasi, berwawasan kebangsaan dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem sebagai perumus kebijakan di bidang :

- a. Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokratis, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam mengembangkan pelayanan menghadapi beberapa tantangan dan peluang, yaitu:

- a. Memudarnya ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Meningkatkan diseminasi wawasan kebangsaan dan ideologi guna menanamkan dan meningkatkan pemahaman ideologi dan pemahaman wawasan kebangsaan.
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik dan etika politik yang tentunya dapat memengaruhi stabilitas politik di Kabupaten Karangasem.
- d. Diseminasi tentang Etika Moral dan Re-orientasi Politik bagi masyarakat; ormas/LSM, tokoh wanita, dan tokoh masyarakat.

Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem secara keseluruhan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkuat keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan perilaku berdemokrasi.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Karangasem dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan politik antara lain:

1. Masih perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
2. Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi: peningkatan kesadaran bela Negara, peningkatan koordinasi forum pembauran kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa, sosialisasi wawasan kebangsaan, bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, bintek peningkatan nilai luhur budaya bangsa,
3. Masih perlunya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, seperti: seminar peningkatan wawasan kebangsaan, fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya, seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan,
4. Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) meliputi: penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, penyuluhan berkembangnya praktik prostitusi, penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur,

5. Masih perlunya pendidikan politik masyarakat, meliputi: verifikasi bantuan keuangan parpol. Pendidikan politik pemilih pemula, pemberdayaan kelembagaan parpol, koordinasi forum-forum diskusi politik, pendidikan politik kepada organisasi masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem

Sebagai perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain situasi kondisi umum di Kabupaten Karangasem tersebut diatas, juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri atas sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat (Kelemahan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya dapat disebut dengan kekuatan penghambat.

Sekalipun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

1. Faktor Pendorong

a. Kondisi Politik.

1. Meningkatkan kinerja legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
2. Makin terrefleksinya keterbukaan komunikasi politik infra dan antar infra struktur politik dan supra struktur politik.
3. Makin berperanya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
4. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
5. Makin meningkatnya kepedulian Organisasi Kemasyarakatan dalam memperdayakan masyarakat.
6. Makin meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karangasem dalam kerangka pembangunan Bali sebagai satu kesatuan dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antar daerah Kabupaten / Kota.

7. Makin meningkatnya implementasi kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dengan ditertibkannya produk hukum daerah, yang nantinya menjadi landasan berpijak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b. Kondisi Ekonomi.
1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
 2. Masih potensialnya obyek wisata dan kekayaan sumber daya alam sebagai sumber kekuatan ekonomi.
 3. Makin meratanya pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lainnya.
 4. Makin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Bali.
 5. Makin berkembangnya industri kecil kerajinan, industri menengah dan perkembangan non migas di daerah Bali.
 6. Makin meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
 7. Cukup baiknya Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap gejolak Ekonomi Nasional.
- c. Kondisi Sosial Budaya.
1. Makin kuatnya kebudayaan daerah Bali sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan, menuju pembangunan Bali yang berbudaya.
 2. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai asset budaya nasional.
 3. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat negara kebangsaan.
 4. Meningkatnya peran serta masyarakat disemua bidang dan sektor pembangunan dan pembangunan SDM mempunyai sasaran untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional.
- d. Kondisi Keamanan.
1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial di masyarakat.
 2. Berperannya pemuka Agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 3. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.
 4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mencegah perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.

5. Makin meningkatnya koordinasi antar instansi dalam perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
6. Semakin baiknya kerja sama kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat (desa adat) dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Karangasem.

2. Faktor Penghambat

a. Kondisi Konflik :

1. Belum mantapnya sistim politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan prilaku berdemokrasi.
4. Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.

b. Kondisi Ekonomi.

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari system perekonomian nasional.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah dan rendahnya profesionalisme manajemen keuangan daerah.
3. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan.
4. Belum efektifnya implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Masih rendahnya Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
6. Masih rendahnya sistem informasi manajemen (SIM) di dalam melaksanakan pembangunan.
7. Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap kondisi dan potensi daerah.
8. Belum mantapnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kedua-duanya.
9. Masih adanya penduduk miskin, yang sebagian besar karena alasan ekonomi dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

c. Kondisi Sosial Budaya

1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika
2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.

3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
 4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global.
 5. Belum mantapnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.
 6. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
 7. Belum meratanya kualitas SDM yang memadai di Kabupaten Karangasem.
- d. Kondisi Keamanan.
1. Belum tuntasnya penyelesaian persatuan dan kesatuan bangsa, seperti konflik vertikal (separatisme) di tingkat nasional yang dapat berimbas ke daerah.
 2. Masih potensialnya konflik etnis di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.
 3. Masih adanya sporadisnya konflik sosial yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
 4. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
 5. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem adalah NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI dengan 6 (enam) misi, 22 (dua puluh dua) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran yang meliputi 7 bidang prioritas untuk mendukung arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem Tahun 2021-2026 sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Dari Visi, Misi dan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem mendukung Misi ke 5 (lima) yakni Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu, Tujuan (20) Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan, Sasaran (31) Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan

melakukan aktivitas kehidupannya. Tujuan (21) Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali, Sasaran (32) Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Karangasem sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, bertujuan untuk meningkatkan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dimana merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam hal Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.3 Telaahan Renstra Kajian K/L dan Renstra

Berbagai fenomena dan kejadian banyak bermunculan pada dekade ini, menyebabkan membawa dampak yang sangat beragam pada kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa, Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, pengaturan kebijakan dan juga penyelamatan sumber-sumber informasi primer dan sekunder, jika dicermati secara seksama, banyak terdapat hal penting yang menjadi issue strategis. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini, dapat dididifikasikan beberapa kecendrungan yang dapat mengarah kepada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut :

1. Kehadiran banyak partai politik disatu sisi menaruh harapan optimis bagi masyarakat untuk bersaing secara demokratis dan dinamis dalam membentuk pemerintahan yang legitimate, namun pemerintah yang terbentuk dinilai masyarakat belum mampu mengatasi masalah-masalah bangsa sehingga muncul pergeseran sikap yang semakin menjatuhkan kredibilitas pemerintah disamping kondisi masyarakat dalam kehidupan politik belum sepenuhnya memahami norma dan etika politik sesuai kepribadian Pancasila.
2. Kebebasan menyampaikan aspirasi pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku menunjukkan

prilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi, yang diwujudkan dalam tindakan provokasi, hujatan, prasangka dan tindakan kecurangan lainnya, menjadi tantangan yang semakin serius dalam melaksanakan agenda reformasi.

3. Gerakan moral dan tuntutan keadilan telah berkembang menjadi tuntutan penegakan hukum yang kadangkala dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum itu sendiri. Prilaku tidak adi dan tidak tegasnya penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah social dan sebagainya, menciptakan kesan adanya diskriminasi dimata masyarakat sehingga berakibat pada munculnya kecendrungan di masyarakat untuk melakukan upaya main hakim sendiri secara agresif dan anarkhis.
4. Kerusuhan diberbagai tempat dan aksi teror telah menciptakan rasa tidak aman dikalangan masyarakat, dan hal ini membawa dampak tidak menguntungkan bagi pemeliharaan kerukunan hidup masyarakat.
5. Lemahnya fungsi kontrol tokoh formal dan informal dalam masyarakat, serta bergesernya nilai budaya gotong royong dan kekeluargaan menjadi individualistik mengancam persatuan dan kesatuan. Semakin dirasakan melemahnya kharisma tokoh-tokoh masyarakat, agama terlihat dari adanya ajakan dan imbauan untuk menghentikan pertikaian tidak mendapat respon yang positif dari kelompok yang bertikai.
6. Pengaruh eksternal yang bersifat global melalui penetrasi paham liberalisme, sosialisme dan komonisme dengan segala bentuk manifestasinya seperti sifat-sifat individualistik, materialistik dan terlalu realistik dengan dalih keterbukaan, demokrasi, HAM dan lingkungan hidup, telah turut memberikan kontribusi negatif terhadap persatuan dan kesatuan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penataan ruang di Kabupaten Karangasem saat ini antara lain:

1. masih terbatasnya pengetahuan aparat dalam penataan ruang sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda diantara aparatur pemerintah didalam memahami peraturan yang ada,
2. rendahnya tingkat kesadaran investor dalam mencari informasi tata ruang (*advice planning*) sebelum melakukan investasi sehingga pembangunan oleh investor cenderung melanggar kawasan perlindungan seperti sempadan pantai, sempadan jurang, sempadan sungai serta pelanggaran RTH berfungsi lindung,
3. kecenderungan investor merangkul dan memanfaatkan organisasi masyarakat setempat seperti Desa Pakraman dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam mencari dukungan setelah melakukan pelanggaran tata ruang jika berhadapan dengan Pemerintah,
4. belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang serta belum optimalnya mekanisme pengendalian pembangunan (*development control*),
5. belum sepenuhnya rencana tata ruang wilayah di pakai sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah serta pelaksanaan investasi,
6. belum selesainya penyusunan review RTRW Kabupaten Karangasem yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
7. belum semua wilayah/kawasan memiliki rencana tata ruang yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi salah penafsiran.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini, dapat diidentifikasi beberapa kecendrungan yang dapat mengarah kepada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut :

1. Ketidakmerataan ekonomi, baik antar daerah, Kabupaten maupun individu yang masih berlanjut pada era reformasi sekarang ini pada gilirannya dapat memicu bahkan memperuncing ketidakpuasan masyarakat.
2. Kehadiran banyak partai politik disatu sisi menaruh harapan optimis bagi masyarakat untuk bersaing secara demokratis dan dinamis dalam membentuk pemerintahan yang legitimate, namun pemerintah yang terbentuk dinilai masyarakat belum

mampu mengatasi masalah-masalah bangsa sehingga muncul pergeseran sikap menjatuhkan kredibilitas pemerintah disamping kondisi masyarakat dalam kehidupan politik belum sepenuhnya memahami norma dan etika politik sesuai kepribadian Pancasila.

3. Kebebasan menyampaikan aspirasi pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi, yang diwujudkan dalam tindakan provokasi, hujatan, prasangka dan tindakan lainnya, menjadi tantangan yang semakin serius dalam melaksanakan agenda reformasi.
4. Gerakan moral dan tuntutan keadilan telah berkembang menjadi tuntutan penegakan hukum yang kadangkala dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum itu sendiri. Perilaku tidak adil dan tegas penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, menciptakan kesan adanya diskriminasi dimata masyarakat sehingga berakibat pada munculnya kecendrungan di masyarakat untuk melakukan upaya main hakim sendiri secara agresif dan anarkis.
5. Lemahnya fungsi kontrol tokoh formal dan informal dalam masyarakat, serta bergesernya nilai budaya gotong royong dan kekeluargaan menjadi individualistik mengancam persatuan dan kesatuan. Semakin dirasakan melemahnya kharisma tokoh-tokoh masyarakat, agama terlihat dari adanya ajakan dan imbauan untuk menghentikan pertikaian tidak mendapat respon yang positif dari kelompok yang bertikai.
6. Pengaruh eksternal yang bersifat global melalui penetrasi paham liberalisme, sosialisme dan komonisme dengan segala bentuk manifestasinya seperti sifat-sifat individualistik, materialistik dan terlalu realistik dengan dalih keterbukaan, demokrasi, HAM dan lingkungan hidup, telah turut memberikan kontribusi negatif terhadap persatuan dan kesatuan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: "Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Setelah ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, selanjutnya ditentukan sasaran. " Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

4.1.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tetap konsisten dengan Misi yang dikembangkan dalam periode tersebut Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Terlaksananya Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
2. Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi

- kemasyarakatan
4. Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
 5. Terwujudnya Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dapat di capai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel TC.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem**

5.1.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, diperlukan strategi yang meliputi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Strategi ini adalah sebagai pedoman kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

5.1.2 Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka ditempuh kebijakan sebagai berikut

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi :	"Nangun Sat Kerthi Loka Bali" di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi ("Karangasem Prakerti Nadi")		
Misi 5 :	Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Terlaksananya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Terwujudnya Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang disusun terdiri dari :

6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan merujuk dengan Kepmendagri 050/3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor
- B. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b. Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

D. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- b. Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b. Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- f. Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

6.2 Pagu Indikatif Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pagu indikatif penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem digambarkan dalam tabel berikut .:

Tabel T-C. 27

Rencana Prograam, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karangasem

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi																																																					
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode																																																				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.																																																			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	8	0	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	Perse	10	4.380.406	10	4.642.756	10	4.920.984	10	5.452.593	10	5.716.287	10	5.716.287	Kesbangpol	Karangasem																																																
		8	0	0	2.0					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Perse	10	75.000.000	10	61.000.000	10	65.500.000	10	70.000.000			10	75.000.000	10	75.000.000	Kesbangpol	Karangasem																																										
		8	0	0	2.0									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Jenis Dokumen	2	28.000.000	2	25.000.000			2	26.000.000	2	27.000.000			2	28.000.000	2	28.000.000	Kesbangpol	Karangasem																																				
		8	0	0	2.0													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1	Jenis Dokumen			1	2.000.000	1	1.500.000			1	2.000.000	1	2.500.000			1	3.000.000	1	3.000.000	Kesbangpol	Karangasem																														
		8	0	0	2.0																			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Jenis Dokumen			1	3.000.000	1	2.000.000			1	2.500.000	1	3.000.000			1	3.500.000	1	3.500.000	Kesbangpol	Karangasem																								
		8	0	0	2.0																									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaaksananya Koordinasi dan Tersusunnya DPA-SKPD	1	Jenis Dokumen			1	3.000.000	1	2.000.000			1	2.500.000	1	3.000.000			1	3.500.000	1	3.500.000	Kesbangpol	Karangasem																		
		8	0	0	2.0																															Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1	Jenis Dokumen			1	4.000.000	1	3.000.000			1	3.500.000	1	4.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000	Kesbangpol	Karangasem												
		8	0	0	2.0																																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jenis Dokumen			1	30.000.000	1	26.000.000			1	27.000.000	1	28.000.000			1	29.000.000	1	29.000.000	Kesbangpol	Karangasem						
		8	0	0	2.0																																											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jenis Dokumen			1	5.000.000	1	1.500.000			1	2.000.000	1	2.500.000			1	3.000.000	1	3.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0																																																	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Perse			10	3.374.406	10	3.498.106			10	3.673.934	10	3.850.093		
8	0	0	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1	3.369.406	1	3.496.106	1	3.671.434	1	3.847.093	1	4.033.287	1	4.033.287	Kesbangpol	Karangasem																																																		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8010201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Jenis Dokumen	1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	3.500.000	Kesbangpol	Karangasem
		8010206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Tersusunnya Laporan Perangkat Daerah	100	Persen	100	274.500.000	100	324.150.000	100	358.550.000	100	415.500.000	100	510.500.000	100	510.500.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1	Tahun	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102062	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	Tahun	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102063	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1	Tahun	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102064	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	Tahun	1	139.000.000	1	163.650.000	1	184.550.000	1	211.500.000	1	275.500.000	1	275.500.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102065	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1	Tahun	1	24.000.000	1	40.000.000	1	44.000.000	1	47.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Tahun	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102069	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Tahun	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102061	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya website OPD	1	Tahun	1	7.500.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8010207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	125.000.000	100	150.000.000	100	161.000.000	100	398.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102072	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	2	unit	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	4	300.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		80102076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	5	unit	5	50.000.000	7	60.000.000	7	65.000.000	10	70.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	Kesbangpol	Karangasem

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi						
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8	0	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2	unit	2	15.000.000	3	25.000.000	3	26.000.000	4	28.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Perse	10	275.000.000	10	320.000.000	10	350.000.000	10	385.000.000	10	420.000.000	10	420.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya surat menyurat	1	Tahun	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya komunikasi terpenuhinya kebutuhan air dan listrik	1	Tahun	1	50.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	1	40.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	1	Tahun	1	140.000.000	1	155.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Perse	10	256.500.000	10	289.500.000	10	312.000.000	10	334.000.000	10	444.000.000	10	444.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Tahun	1	240.000.000	1	270.000.000	1	290.000.000	1	310.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1	Tahun	1	9.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	Tahun	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	Tahun	1	3.500.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kesbangpol	Karangasem
Terlaksananya Penguatan Ideologi	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan	8	0	0			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100	Perse	10	551.000.000	10	588.750.000	10	618.750.000	10	729.400.000	10	840.000.000	10	840.000.000	Kesbangpol	Karangasem

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode		
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	0	0	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Person	10	551.000.000	10	588.750.000	10	618.750.000	10	729.400.000	10	840.000.000	10	840.000.000	Kesbangpol	Karangasem	
		8	0	0	2.0	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	1	dokumen	1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.250.000	1	1.400.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Kesbangpol	Karangasem	
		8	0	0	2.0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	dokumen	1	1.500.000	1	1.250.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	Kesbangpol	Karangasem	
		8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya pelatihan kader bela negara	20	orang	20	536.000.000	30	569.000.000	40	592.000.000	50	690.000.000	50	788.000.000	50	788.000.000	Kesbangpol	Karangasem	
								Terpenuhinya pelaksanaan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan		50	orang	50		60	70	80		100		100		100	Kesbangpol	Karangasem	
								Tersusunnya dokumen rencana aksi		1	dokumen	1		1		1		1		1		1		Kesbangpol	Karangasem
								Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan		50	orang	50		60	70	80		100		100		100		Kesbangpol	Karangasem
								Terselenggaranya pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai		200	orang	200		200	200	200		200		200		200		Kesbangpol	Karangasem
						Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah		9	kali	9		9	9	9		9		9		9		Kesbangpol	Karangasem		
						Terselenggaranya peringatan hari lahir pancasila		1	kali	1		1	1	1		1		1		1		Kesbangpol	Karangasem		
						Terlaksananya Rapat koordinasi Wawasan Kebangsaan		1	kali	1		1	1	1		1		1		1		Kesbangpol	Karangasem		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Tahun	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	1	Tahun	1	2.000.000	1	2.500.000	1	4.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	Kesbangpol	Karangasem
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	8	0	0			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	Perse	100	1.030.500.000	100	1.128.750.000	100	52.893.750.000	100	1.339.400.000	100	1.446.500.000	100	1.446.500.000	Kesbangpol	Karangasem
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	Perse	100	1.030.500.000	100	1.128.750.000	100	52.893.750.000	100	1.339.400.000	100	1.446.500.000	100	1.446.500.000	Kesbangpol	Karangasem

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8	0	0	2.0	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	dokumen	1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.250.000	1	1.400.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	dokumen	1	2.000.000	1	1.250.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat dan Pemerintahan Desa Terlaksananya Sosialisasi/seminar, kepada pemilih pemula, Tokoh Masyarakat, dan Ormas Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik Terpenuhnya dana Hibah pada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim Terfasilitasinya Partai Politik dalam Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol	70	orang	70	1.000.000.000	90	1.094.000.000	110	52.852.000.000	130	1.290.000.000	150	1.385.000.000	150	1.385.000.000	Kesbangpol	Karangasem
									2	kali	2		4		8		16		16		16			
									3	kali	3		4		4		4		4		4			
									8	Parpol	8		8		8		8		8		8			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		800200	003104	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	Tahun	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kesbangpol	Karangasem	
		800200	003105	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	Tahun	1	2.000.000	1	2.500.000	1	4.000.000	1	6.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	Kesbangpol	Karangasem	
Terlaksananya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	800200	004	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	Perse	100	167.500.000	100	180.600.000	100	206.750.000	100	256.900.000	100	307.500.000	100	307.500.000	Kesbangpol	Karangasem	
		800200	0041	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	Perse	100	167.500.000	100	180.600.000	100	206.750.000	100	256.900.000	100	307.500.000	100	307.500.000	Kesbangpol	Karangasem	
		800200	0041	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	Dokumen	1	1.000.000	1	600.000	1	750.000	1	900.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Kesbangpol	Karangasem	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		800200	00412	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	Dokumen	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		800200	00413	Pelaksanaan Kebijakan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan Terlaksananya pengawasan eksternal terhadap organisasi kemasyarakatan	134	ormas	134	157.000.000	134	170.000.000	134	194.000.000	134	242.000.000	134	290.000.000	134	290.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		800200	00414	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60	ormas	60		80		100		134		145		145		Kesbangpol	Karangasem
		800200	00415	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	kali	12		12		12		12		12		12		Kesbangpol	Karangasem
		800200	00414	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	Tahun	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	Kesbangpol	Karangasem
		800200	00415	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	Tahun	1	5.000.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	Kesbangpol	Karangasem
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	800200	0051	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	Perse	100	399.000.000	100	425.300.000	100	476.250.000	100	550.900.000	100	624.500.000	100	624.500.000	Kesbangpol	Karangasem
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	800200	0051	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	Perse	100	399.000.000	100	425.300.000	100	476.250.000	100	550.900.000	100	624.500.000	100	624.500.000	Kesbangpol	Karangasem

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8002001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Dokumen	1	2.000.000	1	1.100.000	1	1.250.000	1	1.400.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Kesbangpol	Karangasem				
		8002002	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Dokumen	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.500.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	Kesbangpol	Karangasem				
		8002003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi / pelatihan kader penyuluh pekat di Kabupaten Karangasem Terfasilitasinya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem Terlaksananya penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan mikol Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan lembaga sosial Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Toleransi Umat Beragama Terfasilitasinya FKUB	40 40 40 40 30 50 1	orang orang orang orang orang Orang Tahun	40 40 40 40 30 50 1	378.000.000 60 60 60 50 70 1	30 60 60 60 50 70 1	403.000.000 85 85 85 75 90 1	50 100 100 100 100 120 1	450.000.000 100 100 100 100 120 1	70 125 125 125 125 150 1	518.000.000 125 125 125 125 150 1	85 125 125 125 125 150 1	585.000.000 125 125 125 125 150 1	85 125 125 125 125 150 1	585.000.000 125 125 125 125 150 1	Kesbangpol	Karangasem				

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		800200	0514	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Tahun	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Kesbangpol	Karangasem	
		800200	0515	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Tahun	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	Kesbangpol	Karangasem	
Terwujudnya Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80016		Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100	Persen	100	727.000.000	100	789.250.000	100	873.750.000	100	969.400.000	100	1.054.500.000	100	1.054.500.000	Kesbangpol	Karangasem	
		80016	201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	Persen	100	727.000.000	100	789.250.000	100	873.750.000	100	969.400.000	100	1.054.500.000	100	1.054.500.000	Kesbangpol	Karangasem	
		80016	201	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	dokumen	1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.250.000	1	1.400.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Kesbangpol	Karangasem	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Penanganan Konflik di Daerah																
		801612	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya bahan perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	dokumen	1	2.000.000	1	1.250.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000			Kesbangpol	Karangasem	
		801613	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Terwujudnya Pemetaan Konflik Sosial Terciptanya laporan situasi wilayah di kabupaten karangasem	1	dokumen	1	415.000.000	1	444.000.000	1	492.000.000	1	540.000.000	1	588.000.000	1	588.000.000			Kesbangpol	Karangasem	
		801614	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	Tahun	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000			Kesbangpol	Karangasem	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Th Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	Tahun	1	3.500.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	Kesbangpol	Karangasem
		8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Terjalinnnya hubungan kerjasama pimpinan daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas forkopimda di Kabupaten Karangasem	6	kali	6	270.000.000	6	300.000.000	6	330.000.000	6	370.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	Kesbangpol	Karangasem
							JUMLAH				7.255.406.404		7.755.406.404		59.990.234.698		9.298.593.698		9.989.287.016		9.989.287.016			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem sebagai acuan untuk pencapaian maupun progres dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026, berikut indikator kinerja Badan Kesbangpol disajikan dalam Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.3.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.3.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.3.8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintaahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya website OPD	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	unit	2	2	2	2	4	5	5
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	5	5	7	7	10	10	10
1.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	2	2	3	3	4	5	5
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya surat menyurat	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya komunikasi terpenuhinya kebutuhan air dan listrik	Tahun	1	1	1	1	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
1.6.4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter, Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Terlaksananya pelatihan kader bela negara	orang	20	20	30	40	50	50	50

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terpenuhinya pelaksanaan seminart, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, Tersusunnya dokumen rencana aksi Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan Terselenggaranya pelacakan rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah Terselenggaranya peringatan hari lahir pancasila Terlaksananya Rapat koordinasi Wawasan Kebangsaan	orang dokumen orang orang kali kali kali	50 1 50 200 9 1 1	50 1 50 200 9 1 1	60 1 60 200 9 1 1	70 1 70 200 9 1 1	80 1 80 200 9 1 1	100 1 100 200 9 1 1	100 1 100 200 9 1 1
2.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
2.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
3.1.2	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
3.1.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat dan Pemerintahan Desa	orang	70	70	90	110	130	150	150
		Terlaksananya Sosialisasi/seminar, kepada pemilih pemula, Tokoh Masyarakat, dan Ormas	kali	2	2	4	8	16	16	16
		Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik	kali	3	3	4	4	4	4	4
		Terpenuhinya dana Hibah pada KPU, Bawaslu, Polres dan Dandim	Lembaga				4			
		Terfasilitasinya Partai Politik dalam Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol	Parpol	8	8	8	8	8	8	8
3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
4.1.2	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
4.1.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan Terlaksananya pengawasan eksternal terhadap organisasi kemasyarakatan	ormas ormas kali	134 60 12	134 60 12	134 80 12	134 100 12	134 134 12	134 145 12	134 145 12
4.1.4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
5.1.2	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
5.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi / pelatihan kader penyuluh pekat di Kabupaten Karangasem Terfasilitasinya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem Terlaksananya penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan mikol Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan lembaga sosial Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Toleransi Umat Beragama	orang orang orang orang orang Orang	40 40 40 40 30 50	40 40 40 40 30 50	30 60 60 60 50 70	50 85 85 85 75 90	70 100 100 100 100 120	85 125 125 125 125 150	85 125 125 125 125 150

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terfasilitasinya FKUB	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
5.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
5.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
6	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
6.1.2	Penyusunan bahan perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya bahan perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
		Terwujudnya Pemetaan Konflik Sosial	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
		Terciptanya laporan situasi wilayah di kabupaten Karangasem	dokumen	12	12	12	12	12	12	12
6.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
6.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
6.1.6	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Terjalannya hubungan kerjasama pimpinan daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas forkopimda di Kabupaten Karangasem	kali	6	6	6	6	6	6	6

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan.

Secara operasional, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2021 – 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian –penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Amboera, 25 Mei 2021



I Ketut Kanginan Subandi, SH

Pembina Tk.I

NIP.19621231 198603 1 326